

Daftar Isi

Gambaran Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 1990 s/d 2006	
Moch. Lutfie Misbach.....	1–7
Peran Civic Diplomacy dalam Mendukung Investasi Kapital dan Strategi Simbolik Indonesia	
June Cahyaningtyas	8–16
Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri	
Citra Hennida	17–23
Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB	
Wulan Purnamawati.....	24–29
Formula Kelembagaan Pemerintah Kota: Studi Evaluasi Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	
Alisjahbana.....	30–35
Jawa di Mata Prancis: Analisis terhadap Roman <i>Voyage Autour du Monde Java, Siam & Canton</i> Karya Comte Ludovic de Beauvoir	
Wening Udasmoro	36–41
Variasi Biologis Populasi Manusia di Pulau Jawa: Analisis Kranimetris	
Fitriya Niken Ariningsih	42–48
Peran Faktor Sosial-Ekonomi dan Gizi pada Tumbuh Kembang Anak	
Myrtati D. Artaria.....	49–58
Analisis <i>Framing</i> Berita Poligami di Media Massa	
Moch. Syahri.....	59–66
Hubungan antara Jenis Media yang Digunakan dalam PEMILU 2004 dengan Perilaku Memilih	
Sri Zul Chairiyah.....	67–75
Sistem Pariwisata di Agropolitan Batu	
Sri Endah Nurhidayati	76–85
Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kitab Kuning	
Khaerul Umam Noer	86–94

Analisis *Framing* Berita Poligami di Media Massa

Moch. Syahri¹

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

ABSTRACT

This article explores polygamy news framing in the mass media. It is based on a research which has used polygamy news of the 2006 online version of Hidayatullah magazine as its object of analysis. The research used framing analytical approach whose focus is on how a news is being given a meaning and framed by the media. The result of the research indicated that the 2006 online version of Hidayatullah magazine has consistently supported polygamy. The reported news indicated that Hidayatullah magazine function as the defender for those practicing polygamy.

Key words: Polygamy, framing, media.

Berita pada dasarnya adalah rekonstruksi tertulis atas sebuah fakta. Wartawan melaporkan kembali apa yang dilihat, dirasakan, dan diamati kepada pembaca. Idealnya, seorang wartawan harus dapat menceritakan ulang sebuah peristiwa secara cermat mungkin, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung di tempat kejadian. Untuk melakukan hal tersebut, peran bahasa sangat penting, karena dengan penggunaan bahasa yang baik, fakta yang ditulis akan dapat ditangkap oleh pembaca sebagaimana fakta yang sesungguhnya. Hanya lewat bahasa yang cermatlah rekonstruksi tertulis itu dapat mengantarkan pembaca untuk membayangkan apa sesungguhnya yang terjadi (Siregar, 1998:90).

Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan interpretasi atas peristiwa manusia, memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruksi sosial. Berita, pada titik tertentu, sangat mempengaruhi manusia merumuskan pandangannya tentang dunia. Pandangan terhadap dunia adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia dimaknai dalam bingkai tersebut. Tanpa adanya bingkai yang jelas, kejadian, peristiwa dan pengalaman manusia akan terlihat “kacau” dan *chaos*. Bingkai pengalaman dapat dilihat sebagai “skenario awal” yang memposisikan setiap pengalaman dan peristiwa dalam plot cerita yang kurang lebih runtut, rasional dan sistematis.

Pada titik inilah fakta sebuah berita menjadi persoalan. Walaupun dalam prinsip jurnalistik bahwa pemberitaan itu harus berimbang dan objektif, tetapi

pada kenyataan tidak demikian. Realitas tidak bisa dipindah begitu saja ke dalam media. Sebab, realitas media merupakan produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap kedalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsep tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Pada proses pemaknaan inilah pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial dengan konstruksi tertentu (Eriyanto, 2002: 16). Dengan kata lain, berita yang dimuat di media massa tidak se-objektif yang dibayangkan pembaca. Ada muatan kepentingan tertentu yang menyertainya

Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2000), Siahaan (2001), dan Sudibyo (2001) membuktikan bahwa peristiwa yang sama, bisa disajikan secara berbeda kepada khalayak pembaca. Nugroho dkk (2000) meneliti berita-berita tentang kenaikan Habibie sebagai presiden RI. Tiga media cetak menjadi objek kajian, yaitu *Kompas*, *Republika*, dan *Merdeka*. Ia menemukan bahwa *Republika* cenderung menganggap kenaikan Habibie konstitusional dan tidak perlu diperdebatkan lagi, *Kompas* mengambil sikap netral, dalam pemberitaannya, *Kompas* menulis bahwa kenaikan Habibie masih pro dan kontra, sementara *Merdeka* menganggap kenaikan Habibie masih bisa dipedebatkan.

Nugroho menyatakan, *Republika* bersikap seperti itu disebabkan oleh orang-orang yang ada di balik

¹ Korespondensi: M. Syahri, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, UNM. Jl. Surabaya No. 6 Malang, Jawa Timur Indonesia. Telp. :0341-567475- 081334431421 E-mail: syahri45@yahoo.com

media tersebut. Seperti diketahui, *Republika* didirikan oleh Habibie, dan kebanyakan wartawan yang bekerja di media tersebut alumni HMI. *Kompas* mengambil sikap netral dikarenakan masih menunggu kepastian situasi, apakah Habibie sebagai penguasa baru akan berpihak kepada pers atau tidak. Sebagai media massa terbesar dan omset milyaran rupiah, *Kompas* perlu bersikap hati-hati dalam menghadapi peristiwa politik saat itu. Sementara *Merdeka* masih mencoba mengajak pembaca untuk beradu argumentasi atas kenaikan Habibie.

Siahaan (2001) dalam penelitiannya tentang pemberitaan tentang jajak pendapat di Timor Timur menemukan bahwa *Jawa Pos*, *Surabaya Post*, *Bali Pos*, *Surya*, *Nusa Pos* berbeda pendapat dalam menyikapi lepasnya Timor Timur dari Indonesia. *Jawa Pos* cenderung menginginkan Timor Timur tidak lepas dari RI, begitu juga dengan harian *Surya*. Sementara *Surabaya Post* cenderung pro demokrasi. Bagi *Surabaya Post*, asalkan proses jajak pendapat berlangsung *fair* dan demokrasi, lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak perlu dipersoalkan. Dan terakhir, *Bali Pos* cenderung tidak rela Timor-Timur lepas dari RI, sebab jajak pendapat yang dilakukan diwarnai banyak kecurangan. Senada dengan dua temuan diatas, Sudibyo (2001) mendapatkan temuan yang sama, yaitu media massa cenderung partisan dalam setiap pemberitaan. Subjek yang dijadikan kajian adalah tabloid *Adil*, *Aksi*, *Detak*, dan *Tekad* pada kasus pemberitaan kerusuhan SARA di Maluku.

Tiga temuan diatas menunjukkan bahwa media massa tidak seobjektif yang bayangkan kebanyakan orang. Ada misi-misi tertentu yang dibawa media sebagai wujud dari agenda lembaganya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana media massa keagamaan mem-framing berita poligami. Poligami menjadi isu yang hangat dan ramai di tulis di media massa edisi tahun 2006.

Seperti diketahui, persoalan poligami dalam agama Islam masih menjadi persoalan dan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Sebagian menganggap hal wajar, dan sebagian cenderung menolak praktik poligami di masyarakat. Sejauh pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa media massa yang berada dibawah kendali Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah cenderung bersikap anti poligami, sementara media massa lainnya, seperti *Hidayatullah* cenderung longgar terhadap praktik poligami di masyarakat. Peneliti tertarik kepada media massa

yang pro poligami mengkonstruksi berita-berita poligami. Argumen-argumen seperti apa yang digunakan untuk mendukung konstruksi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis *Framing*. Robert N. Entman (Eriyanto, 2002:186–195), seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media, mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal seperti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Framing* yang dibuat oleh Kosicki dan Pan (Eriyanto, 2002:254–266). Dalam pendekatan ini, perangkat *Framing* dibagi menjadi 4 struktur besar. **Pertama**, struktur sintaksis, yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa kedalam susunan umum berita. Perangkat *framing* yang digunakan adalah skema berita, sedangkan unit yang dianalisis adalah *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup berita. **Kedua**, struktur skrip, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan peristiwa kedalam bentuk berita. Perangkat *framing* yang digunakan adalah kelengkapan berita dan yang dianalisis kelengkapan unsur berita. **Ketiga**, struktur tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Perangkat *framing* yang digunakan adalah detail fakta, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Unit analisisnya adalah paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat. **Keempat**, struktur retorik, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Perangkat yang digunakan adalah leksikon, grafis, dan metafora. Sedangkan unit yang dianalisis adalah idiom, kata, dan gambar

Data penelitian diambil dari dokumentasi di situs *www.Hidayatullah.com*. Data dikumpulkan dengan cara mengetikkan kata kunci poligami pada menu *search*. Dari hasil penelusuran tersebut, peneliti memilah-milah data sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Fokus penelitian ini adalah berita-berita yang ada di Majalah *Hidayatullah On Line* edisi tahun 2006. Objek kajian adalah berita-berita berkenaan poligami. Tetapi tidak semua berita poligami yang diteliti. Peneliti hanya akan mengambil secara acak berita-berita poligami dalam kurun waktu tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. Pertama pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai "sunnah", yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan Al-Qur'an cenderung diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal belaka. Pandangan kedua membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain adalah keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (Muhammad, 2006).

Seperti yang diuraikan peneliti dalam kajian pustaka, bahwa poligami merupakan masalah *khilafiyah*. Perdebatan tentang masalah poligami tidak pernah menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak. Ada yang setuju, menolak, dan mengambil sikap moderat. Munculnya kasus peselingkuhan Maria Eva dan Yahya Zaini yang juga anggota DPR dan pernikahan kedua Da'i K.H. Abdullah Gymnastiar menjadikan poligami menjadi masalah yang banyak dibicarakan di media massa.

Dalam konteks perdebatan di media massa, setiap media massa mempunyai *frame* tersendiri dalam memuat berita-berita poligami. Ada media massa yang secara terang-terangan mengecam kedua peristiwa tersebut, ada yang mengecam perselingkuhan Yahya Zaini dan memuji pernikahan AA Gym, dan ada yang mengambil sikap netral.

Diantara media massa yang dengan terang-terangan dan konsisten mendukung poligami adalah situs www.Hidayatullah.com. Enam berita yang dimuat di situs www.Hidayatullah.com pada edisi

tahun 2006 secara tersurat menunjukkan konsistensi jajaran redaksi mempertahankan prinsip pro-poligami. Hal ini terlihat dari judul dan isi berita yang dimuat www.Hidayatullah.com. Beberapa judul yang digunakan adalah: Unjuk Rasa Dukung Orang Tua Berpoligami, edisi Senin, 21 Agustus 2006, Buntut Tuduhan Musdah Soal Poligami, edisi Jumat, 28 April 2006, Poligami Dilarang, Perzinaan Dibebaskan, edisi Kamis, 07 Desember 2006, MUI: Tak ada celah untuk revisi regulasi soal poligami, edisi Jumat, 08 Desember 2006, Himbauan PBNU Tak Nonton Infotainment, edisi Rabu, 13 Desember 2006.

Konteks berita *Unjuk Rasa Dukung Orang Tua Berpoligami* dimuat edisi Senin, 21 Agustus 2006, redaksi Majalah *Hidayatullah online* ingin menunjukkan bahwa poligami tidak hanya diterima kalangan umat Islam saja, bahkan di negara Amerika yang terkenal sebagai kiblatnya kaum feminisme, poligami mendapat dukungan. Untuk memperkuat kesan tersebut, redaksi memuat peristiwa demonstrasi anak-anak yang orang tuanya poligami. Pada berita tersebut ditampilkan fakta bahwa anak-anak yang orang tuanya berpoligami merasakan kebahagiaan hidup. Fakta ini bertentangan dengan asumsi yang dikampanyekan oleh aktivis feminisme. Salah satu isu yang digunakan kaum feminisme dan penolak poligami untuk menolak poligami diantaranya ketidakbahagiaan anak-anak yang orang tuanya berpoligami. Kaum feminis selalu berasumsi bahwa anak adalah korban pertama jika orang tua berpoligami. Dengan adanya berita tersebut, redaksi hendak menunjukkan kepada para penentang poligami, asumsi yang selama ini mereka percayai tidak betul.

Kemudian pada edisi 28 April 2006, Majalah *Hidayatullah online* mengangkat berita dengan judul *Buntut Tuduhan Musdah Soal Poligami*. Secara ringkas, berita tersebut ingin membantah anggapan bahwa poligami merupakan sarana penyebaran penyakit kelamin dan penyalahgunaan terhadap anak. Dari pemilihan sumber berita, nampaknya redaksi lebih suka mengambil dari tokoh-tokoh yang pemikirannya sejalan dengan kebijakan redaksi. Misalkan, tokoh dari Majelis Mujahidin Indonesia.

Dari semua berita yang dimuat pada Edisi tahun 2006, yang paling menarik untuk dianalisis secara mendalam adalah berita dengan judul *Poligami Dilarang, Perzinaan Dibebaskan* yang dimuat edisi 07 Desember 2006. Nampaknya berita tersebut merupakan penutup dari polemik poligami.

Frame: Kriminalisasi Poligami, Pelegalan Perzinaan

Sorotan utama dalam berita ini adalah rencana pemerintah yang akan merevisi UU Perkawinan. Pada intinya, pemerintah akan memperluas cakupan poligami. Jika sementara ini aturan poligami hanya dikenakan kepada pegawai negeri sipil, maka dengan adanya revisi, peraturan tersebut akan menjangkau masyarakat sipil. Berita dengan judul *Poligami Dilarang, Perzinaan Dibebaskan* dihadirkan untuk mengkritik keras pemerintah yang akan merevisi UU Perkawinan. Dibuka dengan Lead *Rencana Pemerintah merevisi UU Perkawinan bukan atas dasar agama, tetapi atas dasar hawa nafsu* redaksi hendak mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan. Apalagi jika dibenturkan dengan peraturan agama. Ada dua tema besar yang diusung oleh redaksi dalam berita ini, yaitu 1) Revisi UU Perkawinan mendapat penolakan seluruh elemen masyarakat; dan 2) Pendukung anti poligami tidak resah dengan perzinaan yang liar

Untuk memperkuat tema pertama, redaksi mengambil semua tokoh masyarakat yang berpengaruh sebagai sumber berita. Sumber berita yang diambil terdiri dari pemimpin organisasi keagamaan sampai politisi-politisi senayan. Dua tokoh organisasi keagamaan yang dijadikan sumber berita adalah KH. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU dan Prof. Dr. Din Syamsudin. Pemilihan kedua tokoh tersebut, dan diletakkan pada paragraf-paragraf awal bukanlah tanpa alasan. Sudah menjadi fakta politik bahwa NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang mempunyai daya *pressure* kuat. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah berkaitan dengan agama yang tidak melibatkan kedua organisasi tersebut.

Redaksi secara tidak langsung mengingatkan pemerintah bahwa keputusan pemerintah yang akan merevisi UU Perkawinan tidak akan mendapatkan legitimasi secara keagamaan. Kemudian, untuk memperkuat dukungan politis, redaksi mengutip pendapat semua ketua fraksi yang ada di DPR. Dimulai dengan Fraksi PKB yang diwakili oleh Effendy Choiri, kemudian berturut-turut, dari PAN yang diwakili AM Fatwa, Aisyah Baidlowi dan Ferry Mursyidan Baldan, dari FPG, dan Muzammil Yusuf dari FPKS.

Pengambilan sumber-sumber kutipan dalam berita tersebut menarik untuk dicermati. Tokoh-tokoh senayan yang dijadikan sumber berita dan ditonjolkan adalah orang-orang yang mempunyai

kaitan dengan NU dan Muhammadiyah. Tidak dapat dipungkiri, nama-nama tokoh senayan yang dijadikan sumber berita ada hubungan historis dengan kedua organisasi diatas. Seperti diketahui, walaupun NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang mengambil sikap moderat terhadap masalah poligami. Artinya, kedua ormas keagamaan tersebut tidak menolak atau menganjurkan poligami secara terbuka kepada anggotanya sebagaimana organisasi keagamaan lainnya. Dengan mengutip pendapat tokoh yang ada hubungannya dengan kedua ormas tersebut, redaksi Majalah *Hidayatullah online* ingin menunjukkan bahwa gagasan yang diperjuangkan mendapat banyak dukungan dari semua elemen masyarakat. Tentunya, pemilihan sumber berita dan penyusunan berita seperti itu bukanlah sebuah kebetulan. Melainkan sudah direncanakan dengan baik oleh jajaran redaksi.

Tema kedua yang diusung oleh redaksi dalam berita ini adalah *Pendukung anti poligami tidak resah dengan perzinaan yang liar* (lihat lampiran). Berbeda dengan tema yang pertama, tema yang kedua ini redaksi mengajak pembaca untuk memilih antara poligami yang halal dan perzinaan yang merajalela. Dengan referensi kalimat

Allah menghendaki kedua peristiwa tersebut terungkap dalam waktu bersamaan. Nampaknya Allah ingin melihat reaksi bangsa ini dalam menanggapi kedua peristiwa tersebut

Redaksi meminta pembaca menentukan sikap. Untuk mendukung argumen bahwa para pengusung anti poligami lebih meresahkan poligami dari pada perzinaan, redaksi mengangkat aktifitas kaum penentang poligami. Diantaranya kesibukan menteri, kaum feminis dan ibu-ibu pengajian yang kecewa dengan pernikahan AA Gym. Dalam *frame* Majalah *Hidayatullah online*, apa yang dilakukan oleh komponen masyarakat tergolong aneh. Ketika kasus perselingkuhan Yahya Zaini terbuka, tidak ada reaksi yang luar biasa, seperti demonstrasi, padahal apa yang dilakukan oleh Yahya Zaini jelas-jelas melanggar aturan agama. Sementara, pernikahan AA Gym tidak melanggar aturan agama (dalam arti masih *khilafiyah*). Untuk mendukung fakta ini, redaksi memperkuat dengan kutipan kalimat sebagai berikut

"Meutia dan mereka yang anti-poligami, tidak merasa resah dan prihatin atas "poligami liar" yang dilakukan Maria Eva dan Yahya Zaini.

Kemudian pada paragraf berikutnya diperkuat dengan penjelasan

Lagi-lagi Meutia juga tidak mengeluarkan kecaman atas tindakan pembunuhan janin itu. Apakah para perempuan tidak ikut merasa sakit hati dan diperlakukan tidak adil mengetahui Maria Eva dihamili di luar nikah lalu disuruh membunuh calon anaknya”

Secara ringkas, redaksi ingin menekankan kepada semua pihak, pilihan poligami bukan merupakan kesalahan jika dibandingkan dengan perzinahan liar yang dilakukan oleh Yahya Zaini.

Pada akhir beritanya, redaksi hidayatullah memberikan pilihan kepada pemerintah. “melegalkan” perzinahan yang jelas-jelas melanggar aturan agama dan melarang poligami, maka pemerintah Susilo Bambang Yudoyono akan menjadi Fir’aun abad modern.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa:

Secara tersurat, berita-berita tentang poligami yang dimuat di situs *Hidayatullah* pada edisi tahun 2006, redaksi memposisikan diri sebagai pembela kaum poligami.

Pada berita yang dimuat edisi 07 Desember 2007, *frame* yang diangkat oleh redaksi adalah kriminalisasi Poligami dan Pelegalan Perzinahan. Ada dua tema besar yang diangkat, yaitu 1) Revisi UU

Perkawinan mendapat penolakan seluruh elemen masyarakat; dan 2) Pendukung anti poligami tidak resah dengan perzinahan yang liar.

Daftar Pustaka

- Eriyanto (2002) *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Jogjakarta: LKIS.
- Muhammad, Husein (2007) *Membaca Kembali Ayat Poligami*. [www. swara rahima.or.id](http://www.swara rahima.or.id), akses 20 Agustus 2007.
- Nugroho, B., dkk. (2000) *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: ISAI.
- Siahaan, Hotman dkk. (2001) *Pers yang Gamang, studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur*. Jakarta: LSPS.
- Siregar, A. (ed). (1998) *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudibyo, A. (2001) *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Jogjakarta: LKIS.
- www.Hidayatullah.com (2006) *Unjuk Rasa Dukung Orang Tua Berpoligami*. edisi Senin, 21 Agustus 2006
- www.Hidayatullah.com (2006) *Buntut Tuduhan Musdah Soal Poligami*, edisi Jumat, 28 April 2006.
- www.Hidayatullah.com (2006) *Poligami Dilarang, Perzinahan Dibebaskan* , edisi Kamis, 07 Desember 2006.
- www.Hidayatullah.com (2006) *MUI: Tak ada celah untuk revisi regulasi soal poligami*, edisi Jumat, 08 Desember 2006.
- www.Hidayatullah.com (2006) *Himbauan PBNU Tak Nonton Infotainment*, edisi Rabu, 13 Desember 2006.

Lampiran 1:

Judul Berita: Poligami Dilarang, Perzinaan Dibebaskan (Hidayatullah.com, edisi Kamis, 07 Desember 2006

No.	Proposisi	Sintaksis	Skrip	Tematik	Retorik
K1.	Rencana Pemerintah merivisi UU Perkawinan bukan atas dasar agama, tetapi atas dasar hawa nafsu.	Paragraf <i>lead</i>	What	Tema 1: Revisi UU Perkawinan mendapat penolakan seluruh elemen masyarakat	
K2.	Abdullah Gymnastiar menikah lagi sejak tiga bulan, sementara Maria Eva melakukan perzinaan dengan Yahya Zaini sejak tahun 2004	Paragraf <i>Lead</i>	What, Who		
K3.	Allah menghendaki kedua peristiwa tersebut terungkap dalam waktu bersamaan. Nampaknya Allah ingin melihat reaksi bangsa ini dalam menanggapi kedua peristiwa tersebut.	Referensi			
K4.	Para aktivis feminisme dan ibu-ibu peserta pengajian kecewa dengan pernikahan AA Gym	Parafrase	What, Who	Mendukung tema 2	
K5.	Nursyahbani aktivis gerakan perempuan yang sekaligus anggota Komisi III dari FKB ikut mendukung gerakan Koalisi Perempuan Kecewa AA Gym.	Transisi	Who, what	Mendukung tema 2	
K6.	“Sebagai perempuan, kami sakit hati, poligami dengan alasan apapun telah menyakiti hati kaum perempuan”	Kutipan		Mendukung tema 2	
K7.	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, juga ikut uring-uringan. Selasa (5/12), bersama-sama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar keduanya menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membicarakan PP10/1983 tentang pembatasan poligami. Dia ingin pembatasan itu tidak hanya bagi PNS dan anggota TNI/Polri, tapi juga berlaku bagi pejabat negara dan pegawai swasta	Transisi	Who, what	Mendukung tema 2	
K8.	Meutia mengungkapkan, Presiden menyatakan keprihatinannya dengan kasus poligami yang diterapkan tokoh masyarakat itu. Presiden, kata dia menyetujui untuk memperluas aturan itu. “Presiden mempunyai <i>moral obligation</i> (terikat secara moral) buat memperhatikan masyarakatnya,” kata Meutia	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 2	
K9.	“Titik tolaknya adalah keresahan masyarakat, terutama perempuan yang merasa tak diperlakukan tidak adil dalam perkawinan,” ujarnya.	Kutipan			
K10.	Poligami Liar	Sub Judul	What		
K11.	Meutia dan mereka yang anti-poligami, tidak merasa resah dan prihatin atas “poligami liar” yang dilakukan Maria Eva dan Yahya Zaini.			Tema 2: Pendukung anti poligami tidak resah dengan perzinaan yang liar	Leksikon: poligami liar
K12.	Maria Eva atas persetujuan istri Yahya Zaini menggugurkan janin hasil perzinaan mereka.	Transisi		Mendukung tema 2	
K13.	Lagi-lagi Meutia juga tidak mengeluarkan kecaman atas tindakan pembunuhan janin itu. Apakah para perempuan tidak ikut merasa sakit hati dan diperlakukan tidak adil mengetahui Maria Eva dihamili di luar nikah lalu disuruh membunuh calon anaknya	Transisi		Mendukung tema 2	
K14.	Atau andaikan mereka tidak menggugurkan kandungan, apakah kaum ibu itu tidak sedih dan sakit hati mengetahui kelak anak Maria Eva lahir tanpa bapak yang seharusnya bertanggung jawab atas nasib masa depan anak itu?	Transisi		Mendukung tema 2	
K15.	PBNU menanggapi dengan keras rencana pemerintah yang akan memperketat aturan poligam. Ketua PBNU tidak setuju poligami di atur dengan peraturan pemerintah dan undang-undang.		Who, what	Mendukung tema 1	

No.	Proposisi	Sintaksis	Skrip	Tematik	Retorik
K16.	Lebih baik mengurus masalah kedisiplinan kerja dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan,"sebagaimana dikutip koran SINDO saat berada di Indramayu. Meski tidak secara gamblang menolak rencana revisi PP No 45/1990 ini, Hasyim Muzadi menyatakan, persoalan poligami sebaiknya dibiarkan berjalan secara alamiah			Mendukung tema 1	
K17.	Hasyim Muzadi dihadapan ribuan warga NU menyatakan bahwa poligami adalah pilihan seseorang dan konsekwensi yang akan terjadi menjadi tanggungjawab masing-masing individu	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	Kuantifikasi: Ribuan warga NU
K18.	Ketua Umum Penguru Pusat Muhammadiyah berpendapat sama dengan Ketua Umum PBNU.			Mendukung tema 1	
K19.	Din Syamsudin " Banyak masalah negara yang harus diselesaikan dibandingkan dengan masalah poligami, poligami merupakan masalah khilafiyah dalam agama islam.			Mendukung tema 1	
K20.	Reaksi Senayan	Sub Judul			
K21.	Kalangan anggota DPR mengingatkan, revisi UU Perkawinan jangan sampai melanggar aturan agama.			Mendukung tema 1	
K22.	Effendy Choiri dari FPKB menyatakan bahwa revisi UU Perkawinan tidak boleh melanggar aturan agama. Lebih lanjut Effendy mentakan agama sudah mengatur poligami secara lengkap	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K23.	Wakil Ketua MPR AM Fatwa menyatakan bahwa persoalan poligami harus dilihat pemerintah secara jernih dan objektif. "Jangan sampai pemerintah mengajari masyarakat untuk munafik dari hukum Allah,"	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K24.	Aisyah Baidlowi dari FPG mengakui bahwa poligami memang bisa menjadi jalan keluar darurat di tengah maraknya praktik perselingkuhan. "Dari sudut pandang itu, mungkin benar," katanya. Tetapi, menurut dia, tetap harus ada sisi-sisi lain yang dipertimbangkan, yaitu keadilan bagi keluarga secara keseluruhan. "Perlu benar-benar dipahami, yang dimaksud adil itu bagaimana,"	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K25.	Politikus Golkar Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan bahwa poligami dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia bukanlah fenomena baru. "Tak masalah kalau praktik poligami mau diatur negara, tapi jangan menjadi seperti dilarang," ujarnya.	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K26.	Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Al Muzammil Yusuf khawatir, jika poligami dilarang, justru akan menyemarakkan perzinahan. "Dia bukan diwajibkan, tetapi boleh. Artinya tidak harus, tetapi tidak juga dilarang. Tetapi ada prasyarat adil. Adil inilah yang perlu kita bahasakan lebih jelas. Adil dalam konteks masyarakat dimana hak wanita juga diperhatikan."	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K27.	Suara Nafsu	Sub judul			
K28.	Menurut Aa Gym, pemerintah seharusnya melarang hal-hal yang dinyatakan jelas-jelas diharamkan dan tidak melarang sesuatu yang dihalalkan oleh agama. "Berantas dulu pelacuran dan perzinahan yang masih banyak di negeri ini,"	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K29.	Menurut pimpinan Pesantren Darut Tauhid Bandung ini, poligami dibolehkan dengan syarat yang berat, yang melakukannya harus mempunyai ilmunya.	Parafrase			
K30.	Menurut Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, "Mereka (penentang poligami) itu memang tidak bicara atas agama, tapi atas hawa nafsunya. Ajaran Rasulullah tidak sebodoh dan senaif yang mereka tuduhkan, justru Rasul mengangkat derajat kaum wanita yang dinikahinya," tegas dia	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	

No.	Proposisi	Sintaksis	Skrip	Tematik	Retorik
K31.	Menurut anggota Komisi III DPR (bidang hukum) Patrialis Akbar, poligami justru melindungi hak-hak wanita. Dengan adanya poligami, wanita terhindar menjadi istri simpanan dan hak-haknya bisa dilindungi.	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K32.	Yoyoh Yusroh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, agama Islam membolehkan poligami agar umatnya terhindar dari praktik perzinahan. Karenanya, ia tak keberatan andai suaminya memutuskan untuk berpoligami	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K33.	Jadi Fir'aun?	Sub judul			
K34.	Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, meminta Presiden SBY untuk membuka mata hatinya, sehingga tahu mana yang seharusnya dilakukan (dikutip dari koran Bisnis)	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K35.	Menurut Habieb Rizieq mestinya SBY memberantas pelacuran dan perzinahan, jika SBY melarang poligami apakah SBY akan menjadi Fir'aun yang melawan hukum Allah.	Parafrase			Metafora: menjadi Fir'un
K36.	Kekecewaan yang dialami Habib juga dirasakan tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakiem. Ini artinya, zina yang haram difasilitasi Pemerintah, sedangkan poligami yang halal dikriminalisasi, "ujarnya dikutip koran Duta.	Parafrase			Hiperbola: kriminalisasi poligami
K37.	Poligami dan Kejantanan	Sub Judul			
K38.	Ketua Pengurus PBNU, Masdar Farid Mas'udi salah satu tokoh pendukung aliran liberal juga menyatakan bahwa poligami merupakan gejala yang natural sebagai penyeimbang perempuan yang ingin menikah dan laki-laki yang mampu menjadi suami.	Kutipan	Who, what	Mendukung tema 1	
K39.	"Jumlah perempuan selalu lebih besar dibanding lelaki yang layak menjadi suami. Poligami akan memperkecil ketidakseimbangan itu, " ujar Masdar	Parafrase			
K40.	Menurutnya, sebagaimana dikutip koran Duta Masyarakat, Kamis (7/12), semua yang jantan diciptakan dengan bakat poligami. "Meski begitu, tidak hanya menguntungkan lelaki. Lembaga poligami justru untuk memenuhi hajat hidup dan hal reproduksi perempuan, " ujarnya.	Parafrase	where		
K41.	Masdar menyatakan, seharusnya pemerintah mendorong terjadinya poligami yang bertanggungjawab.	Parafrase			
K42.	Jika Jalan Terus	Sub Judul			
K43.	Jika Pemerintah SBY tetap jalan terus, melarang poligami dan membiarkan perzinahan, maka akan terulang kisah di sebuah negara sekuler di Afrika yang secara hukum lebih melindungi orang yang berselingkuh dan menghukum orang yang berpoligami.	Penutup berita		Mendukung tema 1	